

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Peran DPRD Kota Padang dalam perencanaan pembangunan melalui penggunaan aplikasi SIPD merupakan suatu kewajiban normatif yang bersifat mengikat. DPRD tidak hanya berperan sebagai lembaga pengusul aspirasi masyarakat dalam bentuk pokok-pokok pikiran (pokir), tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mengawal usulan tersebut agar terintegrasi dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RENSTRA, RKPD. SIPD memberi ruang partisipatif dan transparan yang mempermudah DPRD menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif, pengawasan, dan representasi masyarakat melalui teknologi informasi pemerintahan yang akuntabel.
2. DPRD Kota Padang masih menghadapi sejumlah kendala dalam memanfaatkan SIPD, baik dari sisi teknis maupun administratif. Di antaranya adalah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap persyaratan teknis, error sistem atau jaringan saat penginputan, keterbatasan waktu, serta miskomunikasi antar instansi. Hambatan tersebut berdampak pada keterlambatan penginputan pokir hingga usulan yang tidak dapat diakomodasi dalam sistem.
3. Pelayanan yang tersedia dalam aplikasi SIPD, telah disediakan berbagai

modul penting yang meliputi modul perencanaan, penganggaran, dan pemutakhiran. Ketiga modul ini tidak hanya mendukung peran DPRD dalam menyusun dan mengawasi rencana pembangunan, tetapi juga memungkinkan DPRD untuk mengakses dan mengevaluasi program secara berkelanjutan dan terintegrasi. Dengan adanya fitur input pikir, verifikasi usulan, dashboard monitoring, serta pelaporan evaluatif, SIPD memberikan kemudahan akses dan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis SIPD. Berikut saran yang disampaikan penulis :

1. Peningkatan kapasitas SDM DPRD dan sinergi antar lembaga penulis menyarankan agar DPRD Kota Padang bisa lebih rutin mengikuti pelatihan teknis, baik bagi anggota dewan maupun staf sekretariat, supaya lebih paham cara kerja aplikasi SIPD dan alur perencanaan digital lainnya. Dengan adanya pelatihan, diharapkan tidak ada lagi kebingungan saat proses input Pokir atau saat menyesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah. Selain itu, kerja sama antara DPRD, Bappeda, dan OPD sebaiknya terus diperkuat agar proses perencanaan berjalan lebih lancar dan tidak terjadi miskomunikasi atau data yang tertukar.
2. Masyarakat yang ingin menyampaikan usulan kegiatan lewat anggota

DPRD sering kali belum tahu atau belum siap dengan dokumen yang dibutuhkan, seperti proposal, NIB, NPWP, atau akta notaris. Karena itu, penulis memberi saran agar DPRD Kota Padang dan pemerintah daerah bisa menyediakan bantuan atau pendamping khusus yang membantu warga dalam hal ini, misalnya lewat pendamping lapangan atau pelatihan singkat. Bantuan seperti ini penting agar usulan dari masyarakat tidak gugur hanya karena masalah dokumen, padahal niat dan kebutuhannya jelas.

3. Dalam penguatan prasarana teknologi dan penanganan teknis yang lebih responsif pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas jaringan, keandalan server, serta sistem bantuan teknis yang cepat tanggap, terutama di masa penginapan SIPD. Selain itu, proses pelaporan kendala sebaiknya dipangkas agar tidak harus melewati birokrasi panjang, sehingga kendala yang muncul bisa segera ditindaklanjuti dan tidak menghambat proses perencanaan.

